

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi akan pentingnya *good governance* dalam pelaksanaan *e-procurement*. Melalui Surat Edaran LKPP No. 17/KA/02/2012, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dalam hal ini termasuk pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi dan menganalisis terhadap implementasi konsep *good governance* dalam pelaksanaan sistem *e-procurement* melalui LPSE Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian dilaksanakan menggunakan pendekatan non doktrinal yang bersifat kualitatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui observasi terhadap LPSE Provinsi Jawa Tengah dan Data sekunder yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *e-procurement* dapat dilaksanakan dengan metode *e-tendering* dan *e-purchasing* sesuai ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Pelaksanaan *e-procurement* ini memiliki kelebihan seperti meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi, mengurangi biaya operasional, membuat proses pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan pelayanan serta meningkatkan hubungan dengan mitra kerja. Selain itu, ada juga kekurangan dari *e-procurement* antara lain keamanan sistem, Kesalahan Teknis/ maintenance, Kualitas internet, resiko penyedia fiktif, resiko permainan curang para pihak. Pelaksanaan *e-procurement* oleh LPSE Provinsi Jawa Tengah juga telah dilaksanakan sebagai implementasi konsep *good governance*. Hal tersebut dinilai dengan beberapa kriteria yang dirangkum dalam penelitian ini yaitu kriteria akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektif dan efisien serta adanya kepastian hukum.

**Kata kunci :** *Pengadaan Barang/Jasa, Elektronik Procurement, Pemerintahan yang Baik*

## **ABSTRACT**

*This research is based the importance of good governance in the implementation of e-procurement. Through LKPP Letter No. 17/KA/02/2012, the regional government has the obligation to carry out the procurement of goods and services electronically, in this case including the Government of Central Java Province. The purpose of this research is to identify and analyze the implementation of the concept of good governance in implementing the e-procurement system through of LPSE Central Java Province.*

*The research was conducted using a non-doctrinal approach of a qualitative nature and analytical descriptive research specifications. This type of research data is primary data obtained through observations LPSE of Central Java Province and secondary data related to the research.*

*The results of this research show that the implementation of e-procurement can be do by e-tendering and e-purchase methods in accordance with article 38 of Presidential Regulations Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018. Implementation of e-procurement has advantages such as improved data accuracy, improved efficiency in operations, faster application processes, reduced administrative costs, lower operational costs, making procurement processes more competitive, enhanced services and improved relationships with work partners. Besides, there are also shortcomings of e-procurement among other things system security, technical/ maintenance errors, internet quality, fictional provider risk, game risk fraud parties. The implementation of e-procurement by LPSE of Central Java Province has been implemented as a concept of good governance. This is assessed using several criteria summarized in this research, namely the criteria of accountability, transparency, participation, effectiveness and efficiency and legal certainty.*

**Key Words : Procurement, Elektronik Procurement, Good Governance**